



LAPORAN KEGIATAN

Green Prosperity

Knowledge Fair 2016



Le MERIDIEN HOTEL-JAKARTA, 13 - 14 DESEMBER 2016



LAPORAN KEGIATAN

Green Prosperity
Knowledge Fair
2016



Green
Prosper
Knowledge

20

JANUARY 2018



Green Prosperity Knowledge Fair2016

Le Meridien Hotel Jakarta
13 - 14 Desember 2016

Proyek Kemakmuran Hijau Millenium Challenge Account Indonesia yang merupakan kerja sama antar pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Dalam perjalanan tiga tahun ini ada banyak pengetahuan, praktik-praktik baik (*good practices*) dan inisiatif cerdas (*smart initiatives*) yang dihasilkan dari Proyek Kemakmuran Hijau di target wilayah MCA-Indonesia.

Yayasan BaKTI sebagai Manager Pengetahuan Aktivitas Pengetahuan Hijau Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia memandang penting untuk mendiseminasikan secara luas praktik-praktik baik, inisiatif cerdas, dan pengetahuan yang dihasilkan dari proyek ini melalui Green Prosperity Knowledge Fair.



Event berskala nasional yang dilaksanakan pada 13 dan 14 Desember 2016 di Jakarta ini menampilkan hasil dan capaian yang diperoleh Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Dalam pelaksanaan dua hari kegiatan, Green Prosperity Knowledge Fair dihadiri oleh tak kurang dari 300 peserta yang memiliki antusiasme untuk saling bertukar pengetahuan. Mereka adalah para pengambil kebijakan pada tingkat nasional dan daerah, termasuk para *prominent figures*, praktisi dan pemerhati isu lingkungan hidup, akademisi, jurnalis, serta para penerima hibah Proyek Kemakmuran Hijau. Informasi dan pengetahuan yang dipertukarkan dalam Green Prosperity Knowledge Fair ini menjadi masukan yang relevan bagi Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia dalam perjalanannya mencapai tujuan utama.





GALERI INFORMASI

Galeri Informasi adalah pameran yang menampilkan kisah-kisah sukses dan pengetahuan yang dihasilkan Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Sebanyak 15 booth disediakan bagi para mitra Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia untuk memamerkan praktik-praktik baik dan pengetahuan yang berkontribusi pada pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Di Galeri Informasi ini peserta GP Knowledge Fair dapat berinteraksi secara langsung dengan para praktisi. Selain mempromosikan kegiatan dan bertukar pengetahuan, peluang-peluang kerjasama atau peluang untuk memperluas kerjasama antar berbagai pihak dalam bingkai Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia juga dapat dimulai dari Galeri Informasi.

Booth-both dalam Galeri Informasi diatur berdasarkan tema-tema *portofolio* Proyek Kekmakmuran Indonesia. Tema-tema tersebut adalah Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas, Pengelolaan Lahan Gambut, Komoditas Lestari. Selain mitra, Galeri informasi ini juga terdapat booth dari MCA-Indonesia, yang menampilkan informasi-informasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia dalam mendampingi mitra mereka untuk mencapai tujuan proyek Kemakmuran Hijau.

Pengetahuan yang disajikan Galeri Informasi ini berasal dari MCA-Indonesia, Yayasan BaKTI, Konsorsium PETUAH, Blue Carbon Consortium, PEKA SINERGI, WWF Indonesia, Yayasan Kalla, LPEM UI, KM Utama dan HiVOS, KEHATI, Konsorsium Euroconsult Mott MacDonal (EMM), dan Portfolio Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia Energi Terbarukan berbasis Komersil dan Komunitas.

“Terdapat banyak informasi baru tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Selain itu juga ada banyak pengetahuan tentang hasil-hasil olahan dari alam seperti madu, obat-obatan dan lain-lain yang baru kita tahu asalnya,” ungkap Halia Asriyani, seorang pengunjung yang merupakan mahasiswi pasca sarjana yang datang khusus untuk melihat langsung Green Prosperity Knowledge Fair 2016.

Sejak PLTMH beroperasi, koperasi ini kemudian mengurus pemeliharaan distribusi hingga penarikan iuran listrik setiap bulan. Desember 2013, melalui proses yang cukup panjang, Koperasi Jasa Peduli Kasih kemudian mengalihkan pengelolaan PLTMH kepada PLN.

Green
Prosperity
Knowledge
2016
10 April 2016

PANGGUNG ASPIRASI

Panggung Aspirasi menampilkan praktik-praktik baik (*good practices*) dan individu inspiratif terpilih yang dihasilkan dari Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia.

Sebanyak lima praktik baik dari Jambi, Sumba, Lombok dan Sulawesi Selatan ditampilkan di Panggung Aspirasi - GP Knowledge Fair yang menginspirasi dan berbagi tentang karya nyatanya dalam mendukung pembangunan rendah karbon.

Diskusi interaktif diadakan di setiap akhir sesi untuk membuka kesempatan bagi peserta berdialog dengan para praktisi praktik baik, serta perwakilan pemerintah dan institusi lainnya yang relevan.

Panggung Aspirasi - GP Knowledge Fair terbagi atas dua sesi *talkshow*. Sesi pertama mengangkat tema Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dan sesi kedua bertema Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat.

Pada sesi pertama, *talkshow* mengangkat tema Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dengan menampilkan Nilawaty dari Yayasan Mitra Aksi Jambi serta Armin Salassa dan Arman dari Desa Salassae, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ibu Nilawaty dan rekan-rekannya di Yayasan Mitra Aksi berbagi inspirasi bagaimana mengembangkan pertanian berkelanjutan di lahan gambut yang banyak terdapat di Jambi. Mereka bukan sekadar berteori, tapi turun langsung dan tinggal bersama petani. Yayasan Mitra Aksi punya kegiatan yang diberi nama Sekolah Lapang, tujuannya meningkatkan kapasitas petani di lahan gambut. Di Sekolah Lapang itu petani belajar tentang ilmu tanah, belajar melakukan riset sederhana, serta belajar mencari tahu akar masalah dalam pertanian mereka dan cara menanggulangnya.



Di Bulukumba, Armin Salassa dan teman-temannya juga melakukan hal yang hampir sama. Mereka mendampingi petani agar lebih berdaya dan mengikuti perkembangan teknologi. Armin dan teman-temannya mendorong petani untuk meninggalkan bahan-bahan kimia dan kembali ke bahan-bahan organik seperti nenek moyang mereka. Hasilnya, panen berlimpah, hasil lebih sehat dan petani lebih makmur.

Di sesi kedua, talkshow membahas Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat, menghadirkan para champion yang berhasil menciptakan solusi dari tantangan energi fosil yang terbatas. Umu Hinggu dan Teo dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka berdua adalah pengelola koperasi Jasa Peduli Kasih yang sukses mengelola pembangkit listrik menggunakan tenaga air dan angin. Tidak hanya mengelola, mereka juga menjadi supplier energi



listrik bagi PLN.

Selain itu juga hadir Basri dan Haryadi dari Pondok pesantren Istidaddarain, Lombok Utara yang berhasil memanfaatkan kotoran manusia menjadi gas dan listrik melalui reaktor biogas, sehingga bisa menghemat pengeluaran pesantren.

Di akhir sesi, dihadirkan tiga anak muda yang tergabung dalam Garuda Energi Nusantara (GEN Oil). Mereka menjawab keterbatasan energi dengan mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar diesel. Bahan bakar tersebut kemudian mereka distribusikan ke nelayan di pesisir Paotere, Makassar.

“Anak muda yang luar biasa,” ungkap salah seorang peserta GP Knowledge Fair.



ROUNDTABLE DISCUSSION

Roundtable Discussion membahas portofolio Kemakmuran Hijau (Kakao, Lahan Gambut, Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat, Energi Terbarukan Berbasis Komersial, Perhutanan Sosial, Pengetahuan Hijau, dan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif/PLUP).

Roundtable Discussion ini bertujuan menginisiasi Forum CoP yang dihadiri oleh para penggiat dan praktisi yang memiliki kerja dan kepedulian yang sama di setiap isu portofolio untuk saling melakukan knowledge sharing. Roundtable Discussion juga mendiskusikan persoalan apa yang dapat dijadikan agenda-agenda pembahasan Forum CoP di tahun 2017 atas isu portofolio Green Prosperity Project dan mencari metode yang tepat untuk menjaga *knowledge sharing Forum CoP* di waktu yang akan datang.

CoP (*Community of Practitioners*) terdiri dari pemerintah nasional yang terkait, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, mitra pembangunan internasional, komunitas, asosiasi bisnis, akademisi maupun ahli/expert yang bertujuan: a) bagaimana membangun CoP dari para penggiat/praktisi yang memiliki kerja dan kepedulian yang sama di setiap isu portofolio untuk saling melakukan knowledge sharing; b) mendiskusikan persoalan apa yang dapat dijadikan agenda-agenda pembahasan di tahun 2017 untuk menjaga keberlanjutan komunitas (CoP tersebut) di setiap isu portofolio; c) mencari cara/metode/model yang tepat untuk tetap menjaga knowledge sharing forum di antara para anggota CoP. Diskusi dimoderatori oleh para windows holder dari MCA Indonesia dan juga oleh para pakar.

Di hari pertama roundtable discussion terdiri empat tema portofolio yaitu, Pengelolaan Kakao Lestari, Pengelolaan Satu Peta dan Data Spasial, Energi Terbarukan Berbasis Komunitas dan Energi Terbarukan Berbasis Komersil. Masing-masing roundtable discussion diikuti oleh lebih dari 30 orang peserta, bahkan diskusi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menolak penambahan peserta karena telah melebihi kapasitas ruangan. Diskusi berlangsung selama kurang lebih 3 jam, kecuali diskusi dengan tema Pengelolaan Kakao Lestari. Diskusi ini berlangsung lebih dari tiga jam bahkan harus dihentikan oleh moderator meskipun para peserta masih antusias untuk melanjutkan diskusi.



Salah satu topik yang menarik adalah terkait alih fungsi lahan kakao menjadi lahan sawit, utamanya di Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan karena agresifnya industri sawit yang membutuhkan bahan baku lebih banyak sehingga kemudian melakukan ekspansi lahan dalam skala besar. Ekspansi ini membuat beberapa petani kakao jadi tergoda untuk mengonversi lahan mereka menjadi lahan sawit. Dari penuturan peserta diskusi, hal yang sama juga terjadi di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan

Poin-poin lain yang mengemuka dalam Diskusi mengenai Pengelolaan Kakao Lestari ini adalah sebagai berikut.

- 1** Perlunya pemetaan secara spesifik permasalahan kakao di bagian hulu, tengah dan hilir serta bagaimana menghubungkan isu-isu tersebut sehingga dibutuhkan forum untuk menjembatannya.
- 2** Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam diskusi ini antara lain adalah
 - di hulu antara lain terkait trend produksi kakao yang cenderung menurun, konsistensi dari teknikal asistensi yang diberikan pemerintah bagi petani kakao, harga kakao (yang juga dipengaruhi faktor desakan ekonomi), teknikal asistensi dari berbagai pihak untuk hal-hal teknis tentang tanaman kakao, perlunya insentif ekonomi entah dalam bentuk bantuan langsung atau perlindungan harga bagi petani agar konsisten menanam kakao dan tidak beralih ke komoditi lain, tidak adanya tradisi makan coklat di sentra-sentra produksi kakao maupun pada masyarakat Indonesia secara umum serta manajemen pengelolaan kebun.
 - di tengah antara lain terkait jaringan distribusi dimana di tingkat kecamatan misalnya, petani masih bergantung pada satu orang pembeli
 - di hilir antara lain terkait pengapalan, informasi pasar belum adanya penetapan tentang minimum harga biji kakao

- 3 Terkait CoP, perlu ditentukan platform media yang kelak dapat diakses oleh multistakeholder serta kontennya.
- 4 Langkah sederhana untuk keberlanjutan kakao, haruslah dipastikan juga agar petani tidak hanya menanam dan menjual kakao tetapi mereka juga harus mengkonsumsi kakao. Kakao harus menjadi bagian dari gaya hidup mereka setiap hari (kampanye tentang kakao untuk meyakinkan orang-orang disekitar mereka juga untuk konsumsi kakao). Bahkan dalam diksusi/seminar yang membahas tentang kakao maka kakao (produk olahannya) haruslah dihadirkan sebagai snacknya.
- 5 Bicara tentang kakao harusnya juga tidak terbatas pada kakao sebagai bahan pangan tetapi juga sebagai bahan dasar obat maupun kosmetik yang justru harganya lebih mahal. Ini merupakan peluang yang harusnya juga mampu dibaca oleh petani.
- 6 Jika GERNAS Kakao masih dilanjutkan maka kedepan perlu difokuskan ke sentra-sentra produksi kakao dan jangan lagi lakukan ekstensifikasi tapi fokus ke intensifikasinya, misalnya ke rehabilitasi dan peremajaan, pasca panen, tata niaga dan pendampingan petaninya.
- 7 Tantangan lain dalam pengembangan kakao adalah konversi lahan kakao menjadi lahan sawit
- 8 Perlu didorong untuk segera ada penetapan minimum price di sektor kakao.
- 9 Perlu juga dibahas lebih lanjut tentang pemberlakuan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% bagi biji kakao sejak tahun 2014. Biji kakao bukan barang atau jasa yang ada pertambahan nilainya, masih berupa komoditi primer sehingga tidak perlu dikenakan PPN.
- 10 Petani kakao perlu didorong untuk peduli tentang indikasi geografis.
- 11 Untuk menaikkan branding awareness kakao di mata para stakeholder maka perlu dilakukan "*Indonesia Cocoa Movement*, misalnya dengan event "*Cupping of Cacao*" dan lain-lain.
- 12 Inovasi dalam pengolahan kakao maupun keterampilan menyajikan coklat dengan seni yang menarik dapat menjadi satu kekuatan yang menjual untuk mengakses permodalan/ kredit lunak dari lembaga keuangan sehingga penting untuk mengajarkan keterampilan ini bagi petani. Inovasi ini juga penting untuk persaingan petani dengan pasar luar.
- 13 Dalam diskusi-diskusi tentang kakao perlu juga dilibatkan Kementerian Perdagangan serta memperbanyak kehadiran stakeholder dari Perguruan-perguruan Tinggi.

Melalui *Kick off Communtiy of Practices* yang dilaksanakan hari ini diharapkan para stakeholder dapat memanfaatkan berbagai event untuk saling terhubung (diluar yang difasilitasi oleh MCAI maupun BaKTI) serta sepanjang 2017 dapat menyusun agenda platform yang sama yang dibangun berdasarkan mimpi bersama CoP kakao.

- 15 Ada tawaran dari SINTESA agar di bulan Februari 2017 para CoP dapat bertemu lagi di Seminar Nasional Tentang Kakao di Kolaka Utara (Sulteng), dimana hal ini dapat dikoordinasikan dengan Pemda setempat. Dengan tujuan agar CoP dapat bertemu langsung dengan petani kakao di lapangan dan menyaksikan apa yang dikerjakan. (Hal ini akan dibicarakan lanjut oleh para CoP sebagai agenda di 2017, harapannya konsolidasi ide ini akan dibantu oleh Yayasan BaKTI).



PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS KOMUNITAS

Dengan keluarnya Permendagri No. 38 Tahun 2016, masih ada dua hal yang dibutuhkan oleh pengembang energi terbarukan, yaitu adanya offtaker, dan adanya penyalur subsidi. Dengan demikian subsidi disalurkan lewat PLN (ataupun BLU) dan masyarakat memperoleh listrik dengan TDL. Pihak swasta tinggal berhubungan dengan PLN (atau BLU secara B to B).

Persoalan lain terkait subsidi adalah kemampuan ekonomi dan *mindset* masyarakat. Ekonomi masyarakat perlu dibangun sehingga tidak semata bergantung subsidi, dan *mindset* mereka pun perlu dirubah sehingga tidak selalu bergantung pada subsidi atau sesuatu yang gratis. Pengertian subsidi juga tidak harus dibatasi sempit lewat PLN dan BLU, namun bisa saja subsidi lain untuk mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti bisa memikirkan kemungkinan ke depan untuk komersialisasi. Akan tetapi mekanisme komersialisasi perlu dipikirkan dengan baik agar supaya tujuan mula-mula menyejahterakan dan memastikan keadilan malah sebaliknya menjadi memiskinkan dan menyebabkan ketidak-adilan terutama bagi kelompok tertentu seperti kaum perempuan.

Terkait dengan pentingnya memadukan dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan upaya mengejar kesejahteraan, proses pra-kondisi masyarakat sebelum pembangunan pembangkit juga penting diperhatikan. Sehingga masyarakat paham dan siap dengan pemanfaatan yang produktif bukan hanya konsumtif, yang bisa terjadi saat mengalami *culture shock*. Sebaliknya masyarakat bisa juga menolak sebab tidak terbiasa.

Koperasi Kamanggih merupakan contoh dimana masyarakat memperoleh manfaat setelah bekerjasama dengan PLN, dimana pembangkit listrik yang mereka kelola setelah dibangun dari dana hibah di-interkoneksi dengan PLN dan pengelolaannya diserahkan ke PLN. Penerimaan yang diterima koperasi dari harga pembelian per KWh oleh PLN digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas masyarakat.

Standar teknis memang masih menjadi kendala tersendiri. Untuk itu konsorsium PEKA Sinergi yang didukung oleh MCA-Indonesia memfokuskan kegiatan untuk memastikan kompetensi dari para operator yang terlibat dalam EBT ini, melalui pelatihan dan sertifikasi. Tempat pelatihan yang ada di dua tempat yaitu di PPPPTK BMTI Bandung dan di Universitas Mataram. Selain pelatihan, konsorsium juga memiliki program untuk sertifikasi terhadap kompetensi yang pada saat ini berfokus pada 3 level yang paling krusial dari keberlanjutan operasional pembangkit yaitu pemasangan, pengoperasian, dan perawatan. Sistem pelatihan dan uji kompetensi untuk sertifikasi ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembang swasta maupun kelompok masyarakat. Kesimpulan diskusi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas adalah sebagai berikut.

- 1 Permendagri ESDM membuka peluang keterlibatan pihak swasta untuk bersama-sama berinvestasi di off-grid energi terbarukan, tetapi seperti catatan/masukkan dari para pengembang energi terbarukan, yang diperlukan adalah adanya kepastian dari pembelian itu sendiri, sehingga isu siapa yang menjadi *oftaker* itu menjadi penting.
- 2 Dengan adanya kepastian *oftaker* diusulkan beberapa opsi; misalnya apakah itu PLN atau BLU
- 3 Mekanisme kerjasama antara swasta dengan PLN sebagai *oftaker* untuk energi terbarukan itu dimungkinkan, jika kondisinya yang dipertama memungkinkan memang rasio elektrifikasi di daerah tersebut masih rendah, kemudian yang kedua biaya produksi PLN di daerah itu sangat tinggi, sehingga ketika swasta menjual ke PLN itu masih di bawah biaya produksinya. Sehingga PLN pun melakukan “B to B” tidak tertangkap KPK. Kemudian yang ketiga, pengembangpun harus aktif untuk memobilisasi dana-dana hibah atau dana-dana murah dari luar dengan model bisnis terobosan di *off-grid* ini.
- 4 Dengan dibukanya kran swasta untuk masuk di CoP, investasi ini tidak boleh mencederai rasa keadilan atau malah memiskinkan masyarakat yang harusnya menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu penetapan tarif aliran subsidi itu juga perlu menjadi faktor penting dalam kegiatan pengembangan *off-grid* energi terbarukan.
- 5 Pengembangan energi terbarukan yang *off-grid* itu harus didesain secara terintegrasi, bukan hanya melakukan investasi untuk pengadaan listrik, tetapi terintegrasi merupakan kerjasama antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Kemudian harus terintegrasi pula karena ada pihak pengelola yang mampu memfasilitasi, masyarakat mengembangkan dan memanfaatkan listrik

yang dihasilkan tersebut.

- 6** Integrasi juga perlu karena fasilitasi pada masyarakat harus dapat menggerakkan subsidi-subsidi yang sudah ada dan mendorong kemampuan produksi dan daya beli masyarakat, sehingga tidak tergantung pada subsidi yang dialirkan untuk pembangkitan listrik itu sendiri. beberapa model sudah dicobakan, misalkan PLN atau swasta dalam hal ini nantinya memegang peran dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan, sementara masyarakat akan mendapatkan manfaat bersihnya untuk pengembangan fasilitas lainnya.
- 7** Pengembangan energi terbarukan skala kecil untuk yang *off-grid*, itu membutuhkan kapasitas teknis di tingkat masyarakat, dan PEKA SINERGI sedang mengembangkan satu standar kompetensi program pelatihan dan juga untuk sertifikasi, dan diharapkan bisa mengembangkan atau memberikan informasi mengenai standar kemampuan dasar operator sehingga bisa disampaikan kepada pihak komunitas. Hal ini dapat berkontribusi untuk menjamin keberlanjutan dari energi terbarukan skala kecil, sehingga yang akan menentukan bukan hanya pihak swasta tapi juga komunitas penerima manfaat.
- 8** Semua para penggiat, pengembang, peneliti, investor, universitas, kelompok masyarakat, membutuhkan satu *platform* bersama, dimana mereka bisa saling bertukar pembelajaran, dan tapi juga saling bertukar kepentingan. Dan adanya pengembangan virtual COE yang juga dikembangkan bukan hanya oleh WRI tapi oleh juga ESDM dan dari UDAYANA. Ini kita akan uji cobakan sebagai platform yang akan mewadahi kita CoP Energi Terbarukan.



PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS KOMERSIL

Peran energi terbarukan dalam porsi penyediaan energi nasional semakin lama semakin besar. Mulai dari program percepatan pemenuhan energi hingga ke target dan proyeksi pemenuhan energi nasional di tahun 2025, porsi yang diharapkan dari energi terbarukan semakin besar. Namun hingga saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi para pengembang dari energi terbarukan yang berbasis komersial, yang tentu menjadi tantangan untuk bisa memenuhi harapan terpenuhinya pasokan energi nasional dari sumber energi terbarukan.

Berbicara mengenai energi terbarukan berbasis komersial, maka tidak akan lepas dengan manajemen risiko, yang berarti upaya identifikasi risiko dan mitigasi. Pengembangan energi terbarukan akan selalu terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu *Design/planning, Financing, Construction, dan Operation*. Persoalan yang dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan dapat terjadi pada tiap tahapan, karena tiap tahapan memiliki resiko tersendiri.

- Pada tahapan perencanaan, berbagai risiko perlu diidentifikasi. Oleh karenanya *Feasibility Study* perlu dilakukan dengan benar oleh orang yang memiliki kompetensi akan hal ini. Ini yang masih menjadi masalah besar hingga saat ini. Banyak *feasibility study* yang dibuat masih sangat rendah kualitasnya, bahkan memberi kesan terjadinya *copy paste*. Sebagian *Feasibility Study* yang dibuat lebih pada upaya formalitas untuk persetujuan bagi proyek dan untuk mendapatkan anggaran proyek. *Feasibility study* yang rendah kualitasnya di Indonesia juga dipengaruhi oleh sulitnya mendapatkan konsultan yang memiliki kompetensi yang memadai untuk bidang tersebut. Namun, bisa juga disebabkan oleh karena upaya menekan biaya dari pengembang. ICED menyampaikan hasil study yang menyatakan bahwa biaya melakukan *Feasibility study* sebenarnya hanya sekitar 5% dari biaya proyek, jadi pengembang yang serius seharusnya mampu membiayainya.
- *Feasibility study* yang sudah bagus sekalipun, masih memungkinkan terjadinya *cost overrun*.

Oleh karenanya dalam pengembangan proyek, bukan hanya disain proyeknya yang perlu disempurnakan, tetapi pelakunya. Dalam tahapan konstruksi yang memiliki risiko paling besar, kendala kompetensi dari kontraktornya juga masih menjadi kendala di Indonesia. Kurangnya pengalaman, dan tidak adanya standarisasi kompetensi masih merupakan faktor penyebab kegagalan proyek dan kasus-kasus *cost overrun* proyek.

- Instalasi energi terbarukan yang telah terbangun, masih dapat mengalami masalah dalam tahap operation. Selain masalah kesiapan dan kompetensi operator yang mengoperasikan instalasi, masih ada beberapa masalah lain pada tahap operation sebenarnya dapat diminimalisir manakala studi-studi terkait sebelumnya dilakukan secara benar dan berkualitas. Studi interkoneksi adalah contohnya. PLTS yang berbasis komersil memang perlu untuk interkoneksi, namun studi ini masih kurang dilakukan. Studi interkoneksi perlu dilakukan pengembang dengan PLN wilayah setempat untuk mendapatkan solusi-solusi permasalahan interkoneksi yang tepat sesuai kondisi yang ada.

Kesimpulan dari Roundtable CoP Discussion mengenai Energi Terbarukan Berbasis Komersil adalah sebagai berikut.

- Sebanyak 90% dari seluruh *feasibility study* yang pernah dilakukan berbagai proyek energi terbarukan perlu ditingkatkan kualitasnya mengingat *feasibility study* sangatlah penting untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Untuk peningkatan kualitas *feasibility study* ada beberapa lembaga yang bisa mendukung dan bekerja-sama seperti MCA-Indonesia dan ICED.
- Standar kompetensi konsultan pembuat *feasibility study* juga diperlukan segera, bukan hanya kompetensi operasionalnya, tapi juga kompetensi konsultan perencanaannya.
- Terdapat keperluan untuk menginventarisir lembaga donor yang bisa mendukung *improvement* dalam studi perencanaan .
- Peraturan perizinan memang masih perlu dibenahi, karena kadang ada juga aturan yang bertabrakan. Perlu diperjelas jalurnya dan perlu ada sosialisasi.
- Diusulkan perlu tindak lanjut pembuatan FGD yang bisa reguler membahas kelanjutan dari hal-hal yang telah dibicarakan tadi.



KEBIJAKAN SATU PETA DAN DATA SPASIAL

Diskusi Kebijakan Satu Peta dan Data Spasial, lebih banyak berjalan sebagai pertukaran pengetahuan. Perwakilan dari Muaro Jambi tampil menceritakan kisah perjalanan Kabupaten Muaro Jambi yang baru saja selesai melakukan pemetaan lahan secara partisipatif. Pemetaan lahan secara partisipatif ini dianggap memberi efek yang sangat besar baik bagi warga maupun pemerintah daerah. Warga lebih tenang dalam beraktivitas karena tahu batas lahan mereka, pemerintah pun lebih tenang dalam menyusun rencana karena paham betul batas wilayah dan potensi daerah mereka.

Beberapa pembelajaran dari diskusi ini adalah sebagai berikut.

- 1** Terkait kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan program, khususnya mengenai penetapan batas desa dapat mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.27 Tahun 2006 yang diperbarui dengan kemendagri No.45 tahun 2016 tentang Penetapan Batas Desa, serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- 2** Terkait kelembagaan dan mekanisme kerja saat ini terdapat beberapa badan yang bekerja di kabupaten terkait dengan perizinan terutama tentang pengolahan dan pemanfaatan lahan di kehutanan dan energi sumberdaya mineral saat ini sudah dialihkan ke provinsi. Sehingga data yang dimiliki seharusnya di *sharing* sehingga tidak menetap pada satu kelembagaan saja. Dengan adanya *One Map Policy*, data-data tersebut dapat lebih mudah disebarakan.
- 3** Beberapa isu teknis yang dihadapi saat pelaksanaan program adalah pertama, belum tersedianya data ordinat sehingga menyulitkan untuk ditentukan batasan di masing-masing desa. Kedua, pemberian izin masih belum didasarkan pada data spasial yang ada hal ini karena terbatasnya ketersediaan data yang akurat di level pemerintah daerah. Ketiga, masih banyak data yang belum sinkron dan tidak akurat.
- 4** Kendala yang secara umum dihadapi hingga saat ini adalah kurang tersedianya data yang akurat baik di level provinsi maupun di kabupaten sehingga penentuan ordinat semakin sulit.



Di hari kedua, tiga tema portofolio menjadi bahasan Roundtable Discussion, Pengelolaan Lahan Gambut, Pengelolaan Hutan Sosial (*social forestry*) dan pengelolaan Pengetahuan Hijau.

Di sesi diskusi tentang pengelolaan lahan gambut, diskusi diawali dengan informasi luas lahan gambut di Indonesia yang saat ini diperkirakan sekitar 17 juta hektar. Luas lahan gambut ini mengalami penurunan yang sangat besar dalam beberapa tahun belakangan ini. Penyebab penurunan jumlah luas lahan gambut ini beragam, dari alih fungsi lahan hingga kebakaran hutan gambut yang sering sekali terjadi di Indonesia. Informasi terpenting dari diskusi ini adalah perihal pengenalan tentang jenis gambut dan bagaimana cara mengelola gambut yang benar.

Pemahaman yang lebih baik mengenai lahan gambut sangat diperlukan sebelum melangkah lebih jauh pada keputusan-keputusan penting terkait pengelolaan maupun pelestariannya mengingat keragaman tipe lahan gambut (gambut topogen dan ombrogen) memiliki karakter ekologis yang berbeda.

Terkait upaya restorasi dan pemanfaatan gambut, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1** Perlu dikembangkan komoditas yang sesuai di lahan gambut seperti Nenas, Jelutong, Singkong, Pinang, Lada. Perlu mengembangkan demplot bagi masyarakat terkait upaya pengembangan komoditas yang sesuai di lahan gambut;
- 2** Perlu dilakukan upaya pemetaan untuk mengetahui ketebalan lahan gambut, ketebalan muka air tanah, kedalaman parit, mengingat ekosistem gambut memiliki beragam karakteristik sehingga memerlukan perlakuan yang sesuai;
- 3** Pemahaman yang baik dan mendetail mengenai sifat-sifat tanah, memahami jenis-jenis gambut, dan juga perlu mempelajari lansekap lahan gambut untuk mengembangkan komoditas yang sesuai;

- 4 Kebakaran di lahan gambut dapat dicegah. Perlu perhatian utama pada faktor manusia penyebab kebakaran, sehingga pemahaman timbulnya kebakaran perlu monitoring kelembaban permukaan gambut dijelaskan;
- 5 Perbedaan perspektif dalam memandang gambut dapat didekatkan dengan dibentuk sekretariat bersama, diskusi bersama dengan tujuan yang sama; dan
- 6 Diskusi komunitas praktisi seperti ini sangat diperlukan di masa yang akan datang untuk menyamakan pengetahuan kita terkait gambut.



ALUR DISKUSI

1. Pengantar
 - Momen Peran Perbankan Dalam Dukungan UMKM di Masa Pandemi
2. Portofolio MCA Indonesia dalam Bidang Perhutanan Sosial
 - Deskripsi Program MCA
 - Momen untuk program yang relevan
3. Community of Practice dalam Perhutanan Sosial saat ini
 - Momen untuk membangun komunitas
 - Momen untuk membangun komunitas yang relevan untuk mendukung UMKM
4. Apa yang bisa diuntungkan MCA Indonesia dan sebaliknya
 - Momen untuk membangun komunitas yang relevan untuk mendukung UMKM
 - Momen untuk membangun komunitas yang relevan untuk mendukung UMKM

Bagaimana masyarakat dalam skala kecil memanfaatkan hutan mengemuka dalam diskusi perhutanan sosial (*social forestry*). Persoalan utama adalah soal regulasi dan perizinan. Menurut salah seorang peserta, ketika berbicara tentang dokumen izin angkut dalam skala bisnis, masalah tidak terlalu besar. Namun, ketika berbicara dalam skala masyarakat kecil, masalah menjadi berbeda. Regulasi dan birokrasi yang agak rumit membuat warga jadi agak kesulitan mengurus izin pemanfaatan hutan.

Komunitas praktisi (*Community of Practitioners*) perhutanan sosial merupakan kelompok yang tidak hanya memiliki ketertarikan yang sama dan tujuan yang sama melainkan juga sekelompok orang yang berproses bersama dalam pembelajaran bersama untuk membuatnya lebih baik dan lebih lagi. Kelompok-kelompok inilah yang diharapkan akan lahir pada akhir project. Ada 3 aspek yaitu:

- Domain, yakni bidang yang mereka kerjakan. Dalam hal ini tentu yang terkait dengan hutan dan kehidupan sosial masyarakat.
- Komunitas yang ikut dalam kegiatan dan diskusi, yang saling membantu dan berinteraksi satu sama lain
- Praktisi, mereka akan mengembangkan pengalaman-pengalamannya dan mengembangkan berbagai isu yang terjadi untuk menemukan solusinya. Karena MCAI merupakan project maka pasti ada ujungnya, namun komunitas ini akan berjalan terus dan berproses

Kebijakan Perhutanan Sosial didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016. Dalam peraturan tersebut Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Berdasarkan Permen ini maka Hak atau ijin Perhutanan Sosial diberikan pada HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR.

Apa yang akan disumbangkan oleh MCA-Indonesia adalah:

- Informasi terkait perizinan. Informasi ini tidak hanya pada tataran izin pengelolaan hutan saja tetapi meningkat pada izin-izin lainnya seperti izin industri, pengangkutan, izin pemasaran serta model investasi bisnis dan lain-lain yang kini mulai dikerjakan oleh beberapa mitra dan akan terus dikembangkan;
- Model bisnis akan mulai dikembangkan oleh MCA-Indonesia terutama pada level produksi yang sejauh ini menjadi hal yang paling sulit karena pada kondisi ini para praktisi berhadapan dengan masyarakat.
- Dalam hal Knowledge Management, diperlukan pengelolaan pengetahuan dalam topik perhutanan sosial sehingga masyarakat maupun praktisi mendapatkan wadah untuk berbagi pengetahuan. Sehingga informasi yang ada tidak hanya dimiliki oleh satu lembaga saja, apakah pemerintah saja atau NGO saja. Selanjutnya adalah *Knowledge Production*, apakah produk-produk pengetahuan yang dihasilkan oleh MCA-Indonesia bersama mitra-mitranya baik hal yang baru maupun hal lama namun bersifat scale-up, perlu untuk didokumentasikan dan disebarluaskan. Tentunya ini perlu juga dikerjasamakan baik dengan lembaga lain atau proyek lainnya.



Keinginan untuk membuat kondisi yang lebih baik dari sebuah masalah bersama merupakan motivasi yang kuat untuk belajar dan mencari tahu sesuatu, atau bahkan menemukan sesuatu sebagaimana pengalaman dari Komunitas Swabina Petani Salassae (KSPS). Sebagai sebuah komunitas maka pengetahuan dan pengalaman seseorang perlu dibagi dan diteruskan kepada anggota komunitas yang lain.

Dari sisi pengelola pengetahuan, Yayasan BaKTI menunjukkan bahwa beragam pendekatan dan diversifikasi media, merupakan strategi yang terbukti efektif digunakan untuk mencapai beragam sasaran. Pengelolaan pengetahuan yang dilakukan yayasan BaKTI bukan hanya soal mengumpulkan dokumen dan membagikannya kembali tapi justru lebih pada pemilik pengetahuan/informasi yaitu orang-orangnya. Dengan demikian BaKTI bertindak sebagai *Knowledge hub* di wilayah KTI. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan selain melalui media, juga melalui jaringan dan event-event khusus. Baik pendekatan melalui media, jaringan, maupun event-event yang diselenggarakan, semuanya dilakukan secara terdiversifikasi sesuai karakteristik penggunaannya.

Dalam pengelolaan pengetahuan ada pada tiga aspek yang berperan yaitu orang-orangnya, budayanya dan teknologi atau sistimnya. Studi yang pernah dilakukan, berdasarkan informasi dari program KSI menyatakan bahwa faktor manusialah yang paling berperan yaitu sebesar 70%, kemudian budaya 20% dan yang terakhir teknologi yaitu 10%. Permasalahan utama dalam pengelolaan pengetahuan bukan pada mengumpulkan laporan-laporan tertulis tapi pada pengetahuan yang *tacit*. Kemampuan untuk bisa meng-*capture knowledge* sangat bergantung pada kemampuan kognitif seseorang untuk meng-*capture*.

Sekalipun teknologi bukan permasalahan utama dalam pengelolaan pengetahuan, namun tujuan utama dari teknologi adalah agar kita bisa lebih efektif dan produktif. Oleh karenanya penggunaan teknologi dalam system pengelolaan pengetahuan juga masih memiliki peran. Salah satu contoh dari upaya mengembangkan Sistim Informasi Pengelolaan Pengetahuan adalah seperti yang dilakukan oleh konsorsium PETUAH, yang disebut GKMIS (*Green Knowledge Management Information System*).

Tiga hal penting dalam pengelolaan pengetahuan adalah,

1 Motivasi Pengelolaan Pengetahuan,

Bisa berupa kebutuhan penyampaian informasi atas persoalan bersama, kebutuhan membagi informasi atas manfaat yang pernah dialami, kebutuhan untuk melakukan peningkatan kapasitas, dsb.

2 Metode,

Perlu memperjelas peran antara penyuplai pengetahuan dan pengelola pengetahuan, namun dapat saja dilakukan secara bersamaan. Peran pengelola pengetahuan dituntut lebih dari sekedar pengumpul dokumen tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana meng-*capture tacit knowledge*, mengemas dan mengkomunikasikannya sesuai konteks. Sistem informasi dan teknologi bukanlah persoalan terpenting dalam pengelolaan pengetahuan namun akan dapat membantu efektifitas dan produktivitas pengelolaan pengetahuan.

3 *Content* atau Isi dari Pengetahuan

Pengetahuan yang dikelola dan akan dibagi perlu untuk telah teruji di basisnya, atau telah terverifikasi berdasarkan kriteria tertentu, serta harus sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kebutuhan untuk membahas lebih lanjut hal-hal terkait kontekstualisasi dan relevansi *content*, bagaimana membangun metode pengelolaan pengetahuan yang kolaboratif dan efektif, serta bagaimana mempertemukan pemilik dan pengguna di tengah keberagaman bahasa kepentingan perlu ditindak-lanjuti lewat CoP dari pengelolaan pengetahuan ini, pada pertemuan/kesempatan berikutnya.



PHOTO STORY COMPETITION

Kompetisi foto dengan tema “Tunjukkan Aksimu sebagai Pahlawan Lingkungan” dimana para peserta memasang foto dengan tema tersebut di media sosial seperti Facebook dan Instagram.

Kompetisi foto dengan tema “Tunjukkan Aksimu sebagai Pahlawan Lingkungan” dimana para peserta memasang foto dengan tema tersebut di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kompetisi ini diikuti oleh para pemerhati lingkungan dari seluruh Indonesia dan enam orang berhasil terpilih sebagai pemenang.

Pemenang Kompetisi Foto **#PahlawanLingkungan**

1. Sarifah Nurhasanah, Jakarta
2. Famega Syavira Putri, Jakarta
3. Azis Pusakantara, Sumatera Barat
4. Dinmas Masyudin, Yogyakarta
5. Amalia Martha Gumansalangi, Jakarta
6. Dila Farodilah Muqoddam, Jakarta

Sarifah Nurhasanah sebagai pemenang pertama berhak mendapatkan hadiah perjalanan mengunjungi lokasi pengelolaan energi terbarukan di Lombok. Lima pemenang lainnya masing-masing mendapatkan voucher belanja Buku Gramedia.

TANGGAPAN PESERTA

TANGGAPAN PESERTA GALERI INFORMASI & FORUM INSPIRASI

*Terstruktur baik &
stand-standnya
menarik dan
menggambarkan
semangat
perubahan*

*LUAR BIASA,
Bisa melihat
potensi-potensi
yang dilakukan
di Indonesia*

*Menginspirasi,
datangkan
tokoh-tokoh muda
berprestasi,
KERENN*

*Pertemuan sangat
inspiratif & sukses
memperluas
jejaring COP GK*

*Bagus membangun
networking para
pelaku di bidang
Green/RE, juga
membantu
memperoleh
informasi*

*Sumber inspirasi
dan sumber
inovasi baru*

*Setiap peserta
mendapat
kesempatan untuk
mendapat
informasi*

*Mampu menjadi
fasilitas dalam
menyebarkan
informasi yang
bermanfaat*

bermanfaat dan memberi inspirasi untuk melakukan usaha kreatif

menghadirkan praktisi-praktisi yang mengaplikasikan metode teknologi dan konsep

Membuka kesempatan untuk mempertemukan stakeholder terkait

adanya pertukaran informasi yang terus berkembang dan memberikan inovasi

banyak ide besar tapi sederhana yang dapat dikembangkan untuk Indonesia raya

Berjalan hampir sempurna, adanya pemusik pengiring

Banyak wawasan yang diperoleh, mengetahui tokoh dan berita inspirasi mengenai kemakmuran hijau

memberi informasi baru bagi masyarakat umum, membuka pandangan lebih luas tentang apa yang sudah dicapai Indonesia

menambah wawasan terkait isu-isu pembangunan berbasis rendah karbon

TANGGAPAN PESERTA DISKUSI COMMUNITY OF PRACTICE (CoP)

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LAHAN GAMBUT

menambah informasi untuk diimplementasi dalam pekerjaan

Dapat menjadi masukan bagi BRG dalam mengimplementasikan kegiatan restorasi

sharing informasi baik karena banyak pihak yang terlibat

PERHUTANAN SOSIAL

banyak informasi dalam penyempurnaan program perhutanan sosial

pengetahuan perhutanan sosial yang bisa diimplementasikan di tempat lain

dapat mengetahui arah pemerintah dan lembaga terkait perhutanan sosial

menemukan beberapa topik yang secara kongkrit bisa ditindaklanjuti

PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

mendapat masukan dari pelaku bisnis secara langsung

menambah pengetahuan tentang renewable energi komersial

memperjelas bahwa RE komunitas memiliki tantangan dan peluang

menambah wawasan tentang implementasi, tantangan & solusi dari daerah lain untuk program

membuka wawasan dan menambah pengetahuan di bidang energi terbarukan

PENGELOLAAN KAKAO LESTARI

memberikan optimisme, motivasi, dan kiat-kiat cerdas untuk pengembangan kakao di Sumba

informasi dari peserta merupakan penguatan bagi aktivitas yang dilaksanakan

KEBIJAKAN SATU PETA DAN DATA SPASIAL

*Narasumber dari
BIG sangat
informatif dan
mengakomodir
sharing
dari partisipan lain*

*banyak
informasi
terkait
kebijakan
satu peta*

*menambah pengetahuan
mengenai satu peta
dan kemungkinan
hubungannya dengan
satu data, e-planning,
e-government yang
sedang didukung oleh
program KSI*



YAYASAN BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Jl. H. A. Mappanyukki No.32, Makassar 90125, Sulawesi Selatan

T.: +62 411 832228, 833383 F.: +62 411 852146 E.: info@bakti.or.id

www.bakti.or.id www.batukarinfo.com

www.facebook.com/YayasanBaKTI www.twitter.com/InfoBaKTI